

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

A.2. GAMBARAN UMUM BPK RI

*Kebijakan
Teknis*

Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

a. Susunan Keanggotaan BPK RI

Undang-undang No. 15 Tahun 2006 yang merupakan pengganti UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa susunan keanggotaan BPK RI terdiri dari sembilan orang anggota yang keanggotaannya disahkan dengan Keputusan Presiden.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

Susunan keanggotaan BPK RI per 31 Desember 2008 berdasarkan Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan Keputusan Presiden No.28/P Tahun 2007 tanggal 24 April 2007 adalah:

Ketua	: Prof. Dr. Anwar Nasution
Wakil Ketua	: H. Abdullah Zainie, SH.
Anggota I	: Drs. Imran, Ak.
Anggota II	: Drs. I Gusti Agung Made Rai, MA.
Anggota III	: Drs. Baharuddin Aritonang, M. Hum.
Anggota IV	: Dr. Ir. Herman Widyananda, SE., M.Si.
Anggota V	: Hasan Bisri, SE., MM.
Anggota VI	: Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
Anggota VII	: Irjen Pol. (purn) Drs. Udju Djuhaeri

Pada tahun 2009 terjadi perubahan keanggotaan BPK RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 79/P Tahun 2009 tanggal 11 Oktober 2009, yaitu pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan BPK RI sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Anwar Nasution, SE., MPA.
2. Drs. Imran, Ak.
3. Drs. Baharudin Aritonang, M. Hum
4. Sdr. Hasan Bisri, SE.
5. Drs. I Gusti Agung Rai, Ak., MA.

Sedangkan pemberhentian dengan hormat H. Abdullah Zaini, SH. disebabkan karena yang bersangkutan meninggal dunia sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2009 tanggal 24 April 2009, dan pemberhentian dengan hormat Drs. Udju Djuhaeri disebabkan karena yang bersangkutan mengundurkan diri sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 58/P Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009.

Susunan keanggotaan BPK RI per 31 Desember 2009 adalah:

Ketua	: Drs. Hadi Purnomo, Ak.
Wakil Ketua	: Dr. Ir. Herman Widyananda, SE., M.Si.
Anggota I	: Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., Ak., MM., CPA.
Anggota II	: Drs. H. Taufiequrachman Ruki, SH.
Anggota III	: Hasan Bisri, SE., MM.
Anggota IV	: Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.
Anggota V	: Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.
Anggota VI	: Dr. H. Rizal Djalil
Anggota VII	: Drs. T. Muhammad Nurlif

b. Tujuan-tujuan Strategis

- Mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional;
- Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;
- Mewujudkan BPK RI sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;
- Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara;

c. Lingkup Tugas

Sesuai dengan mandat undang-undang, berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya, BPK RI melaksanakan tiga macam pemeriksaan:

- Pemeriksaan Keuangan; pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- Pemerikaan Kinerja; pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
- Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu; pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

A.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN*Pendapatan***PENDAPATAN**

Untuk Tahun 2009, BPK RI mengestimasi penerimaan negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah sebesar Rp547.000.000. Realisasi PNBP yang dikelola BPK RI dan telah disetorkan ke rekening kas negara selama tahun 2009 adalah Rp2.974.695.971, sehingga terjadi pelampauan target penerimaan sebesar Rp2.427.695.971 atau 543,82% dari estimasi yang ditetapkan dalam DIPA.

Pelampauan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari yang diestimasi sebesar Rp547.000.000 terjadi karena kenaikan yang signifikan untuk seluruh PNBP, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2009 Berdasarkan MAP

MAP	Uraian	Estimasi	Realisasi	% Realisasi
42311	Pendapatan Penjualan produksi/sitaan	12.000.000	224.700.000	1872,50%
42312	Pendapatan Penjualan Aset	20.000.000	1.840.000	9,20%
42314	Pendapatan Sewa	130.000.000	382.882.189	294,52%
42322	Pendapatan Jasa II	385.000.000	341.509.157	86,69%
42375	Pendapatan Denda I	-	34.583.418	0%
42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	-	1.931.379.262	0%
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	-	37.826.691	0%
42399	Pendapatan lain-lain	-	19.975.254	0%
Total		547.000.000	2.974.695.971	543,82%

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

Belanja

BELANJA

Untuk tahun 2009, BPK RI memperoleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp1.736.279.337.000. Realisasi belanja tahun 2009 adalah Rp1.590.920.682.420 atau 91,63% dari alokasi belanja yang dianggarkan.

Realisasi belanja menurut jenis belanja tahun 2009 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2009 Berdasarkan Jenis Belanja

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	553.327.062.000	475.033.044.240	78.294.017.760	85,85%
52	Belanja Barang	626.637.487.000	568.918.455.141	57.719.031.859	90,79%
53	Belanja Modal	556.314.788.000	546.969.183.039	9.345.604.961	98,32%
Total		1.736.279.337.000	1.590.920.682.420	145.358.654.580	91,63%

Realisasi belanja menurut program tahun 2009 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2009 Berdasarkan Jenis Program

Kode Program	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
109	Penerapan Pemerintahan yang baik	762.088.488.000	663.409.798.946	87,05%
110	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	331.113.241.000	305.622.438.256	92,30%
112	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	56.062.785.000	40.876.857.015	72,91%
113	Pengelolaan SDM Aparatur	30.000.000.000	29.283.281.157	97,61%
117	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	551.811.694.000	546.982.489.091	99,12%
120	Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara	4.333.622.000	4.096.608.705	94,53%
122	Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara	869.507.000	649.209.250	74,66%
Total		1.736.279.337.000	1.590.920.682.420	91,63%

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2009 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPK RI (Bagian Anggaran 04).

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPK-RI disusun secara berjenjang dari unit akuntansi tingkat satuan kerja sampai dengan unit akuntansi tingkat lembaga.

BPK-RI memiliki 2 (dua) unit akuntansi tingkat eselon I yaitu Unit Akuntansi Eselon I BPK Pusat dan Unit Akuntansi Eselon I Sekretariat Jenderal. Unit akuntansi eselon I BPK Pusat mempunyai 1 (satu) unit akuntansi tingkat satuan kerja yaitu unit akuntansi satuan kerja BPK Pusat. Unit akuntansi Eselon I Sekretariat Jenderal mempunyai 35 satuan kerja yaitu unit akuntansi satuan kerja Sekretariat Jenderal, unit akuntansi satuan kerja Pusdiklat dan 33 unit satuan kerja kantor perwakilan di ibukota provinsi seluruh Indonesia.

Sistem aplikasi akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan BPK merupakan sistem yang dibangun oleh Kementerian Keuangan yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SAK menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK per 31 Desember 2009 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga (LKKL) telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK BPK RI adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pendapatan jasa giro dibukukan sebesar uang yang disetorkan ke Rekening Kas Negara, yang telah dikurangi pajak pendapatan jasa giro dan biaya bank oleh Bank Persepsi di tiap-tiap Satuan Kerja di Lingkungan BPK RI.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TP/TGR.

Uang muka terdiri dari Uang Muka Belanja Barang dan Uang Muka Belanja Modal. Uang muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca, yang berasal dari belanja yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani DIPA tahun berjalan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan SAP, bilamana persediaan dalam kondisi rusak maka cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan, bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Hasil inventarisasi fisik tersebut diinput ke dalam Aplikasi Persediaan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Dalam aplikasi tersebut dilakukan pembulatan ke nilai terdekat. Dan saldo persediaan yang dicatat dalam neraca adalah saldo persediaan setelah kuantitas barang persediaan dibulatkan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 2009 berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset tetap pada neraca awal (perolehan sampai dengan 31 Desember 2004) dilaporkan di neraca per 31 Desember 2008 berdasarkan hasil revaluasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin ditetapkan kembali dalam PMK 171/PMK.05/2008, dengan uraian sebagai berikut:

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pedoman kapitalisasi dan penilaian BMN. Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000, serta yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000, tidak dikapitalisasi. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-18/MK.6/2010 perihal Penyusutan Aset Tetap, menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan penyusutan aset tetap belum ditetapkan, sehingga penyusutan aset tetap di lingkungan Pemerintah Pusat belum diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.

Aset Lainnya

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TP/TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara (TP) atau pegawai negeri bukan bendahara (TGR) dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, dan Aset Tak Berwujud. Aset Lain-Lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Termasuk dalam kelompok Aset Lain-Lain adalah piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

2. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima di muka timbul pada saat Pemerintah telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.

3. Uang Muka dari KPPN

Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan ke dalam Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan sumber pendanaan Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2009

No	Uraian	Estimasi/Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	547.000.000	2.974.695.971	543,82%
	a. Penerimaan Pajak	-	-	~
	b. PNB	547.000.000	2.974.695.971	543,82%
	c. Hibah	-	-	~
2	Realisasi Belanja Negara (Berdasarkan sumber dana)	1.736.279.337.000	1.590.920.682.420	91,63%
	- Belanja Rupiah Murni	1.690.064.785.000	1.562.391.048.315	92,45%
	- Belanja Pinjaman LN	28.394.635.000	17.596.629.232	61,97%
	- Belanja Rupiah Pendamping	-	-	~
	- Belanja Hibah	17.819.917.000	10.933.004.873	61,35%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA

BPK RI tahun 2009 mengestimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya berdasarkan DIPA Tahun 2009) sebesar Rp547.000.000. Realisasi PNB Tahun 2009 adalah sebesar Rp2.974.695.971 atau melebihi estimasi sebesar Rp2.427.695.971 atau 543,82%.

Komposisi realisasi PNB Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2009

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1.	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (MAP 42311)	12.000.000	224.700.000	1.872,50
2.	Pendapatan Penjualan Aset (MAP 42312)	20.000.000	1.840.000	9,20
3.	Pendapatan Sewa (MAP 42314)	130.000.000	382.882.189	294,52
4.	Pendapatan Jasa II (MAP 42322)	385.000.000	341.509.157	88,70
5.	Pendapatan Denda I (MAP 42375)	-	34.583.418	-
6.	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (MAP 42391)	-	1.931.379.262	-
7.	Pendapatan Pelunasan Piutang (MAP 42392)	-	37.826.691	-
8.	Pendapatan Lain-lain (MAP 42399)	-	19.975.254	-
	Total	547.000.000	2.974.695.971	543,82

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Realisasi
Pendapatan
Penjualan Hasil
Produksi/Sitaan
Rp224,70 juta*

B.2.1.1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (MAP 42311)

Berdasarkan DIPA Tahun 2009, BPK RI mengestimasi PNBP yang berasal dari Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (MAP 42311) sebesar Rp12.000.000. Adapun realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (MAP 42311) Tahun 2009 adalah sebesar Rp224.700.000 atau 1.872,50% dari yang ditargetkan.

*Realisasi
Pendapatan
Penjualan Aset
Rp1,84 juta*

B.2.1.2. Pendapatan Penjualan Aset (MAP 42312)

Berdasarkan DIPA Tahun 2009, BPK RI mengestimasi PNBP yang berasal dari Pendapatan Penjualan Aset sebesar Rp20.000.000. Adapun realisasi Pendapatan Penjualan Aset (MAP 42312) sebesar Rp1.840.000 atau 9,20% dari yang ditargetkan.

*Realisasi
Pendapatan
Sewa Rp382,88
juta*

B.2.1.3. Pendapatan Sewa (MAP 42314)

Berdasarkan DIPA Tahun 2009, BPK RI mengestimasi PNBP yang berasal dari pendapatan sewa (MAP 42314) sebesar Rp130.000.000. Adapun realisasi pendapatan sewa Tahun 2009 adalah sebesar Rp382.882.189 atau 294,52% dari yang ditargetkan. Pendapatan sewa sebesar Rp382.882.189 terdiri dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri (MAP 423141) sebesar Rp27.360.939 dan Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan dan Gudang (MAP 423142) sebesar Rp355.521.250.

*Realisasi
Pendapatan
Jasa II
Rp341,51 juta*

B.2.1.4. Pendapatan Jasa II (MAP 42322)

Berdasarkan DIPA Tahun 2009, BPK RI mengestimasi PNBP yang berasal dari Pendapatan Jasa II (MAP 42322) sebesar Rp385.000.000. Adapun realisasi Pendapatan Jasa II Tahun 2009 adalah Rp341.509.157 atau 88,70% dari yang ditargetkan.

*Realisasi
Pendapatan
Denda I
Rp34,58 juta*

B.2.1.5. Pendapatan Denda I (MAP 42375)

Berdasarkan DIPA Tahun 2009, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBP yang berasal dari Pendapatan Denda I (MAP 42375). Adapun realisasi Pendapatan Denda I Tahun 2009 adalah Rp34.583.418.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Realisasi
Pendapatan
Penerimaan
Kembali TAYL
Rp1.931,38 juta*

B.2.1.6. Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (MAP 42391)

Berdasarkan DIPA Tahun 2009, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBPN yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) (MAP 42391). Adapun realisasi penerimaan kembali TAYL Tahun 2009 adalah sebesar Rp1.931.379.262. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja TAYL (MAP 42391) sebesar Rp1.931.379.262 terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL (MAP 423911) sebesar Rp835.627.997, Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni TAYL (MAP 423913) sebesar Rp245.698.932 dan Penerimaan Kembali Lainnya TAYL (MAP 423919) sebesar Rp850.052.333.

*Realisasi
Pendapatan
Pelunasan
Piutang
Rp37,83 juta*

B.2.1.7. Pendapatan Pelunasan Piutang (MAP 42392)

Berdasarkan DIPA Tahun 2009, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBPN yang berasal dari pelunasan piutang (MAP 42392). Adapun realisasi Pendapatan Pelunasan Piutang Tahun 2009 adalah sebesar Rp37.826.691 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara (MAP 423922).

*Realisasi
Pendapatan
Lain-lain
Rp19,98 juta*

B.2.1.8. Pendapatan Lain-lain (MAP 42399)

Berdasarkan DIPA Tahun 2009, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBPN yang berasal dari Pendapatan Lain-lain (MAP 42399). Adapun realisasi Pendapatan Lain-lain Tahun 2009 adalah sebesar Rp19.975.254, yang terdiri dari Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (MAP 423991) sebesar Rp5.085.744 dan Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp14.889.510.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Realisasi
Belanja Negara
Rp1.590.920,68
juta*

B.2.2. BELANJA NEGARA

Realisasi belanja negara BPK RI berdasarkan jenis belanja Tahun 2009 adalah sebesar Rp1.590.920.682.420 atau 91,63% dari anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp1.736.279.337.000. Rincian anggaran dan realisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2009

No.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	553.327.062.000	475.033.044.240	85,85%
2	Belanja Barang	626.637.487.000	568.918.455.141	90,79%
3	Belanja Modal	556.314.788.000	546.969.183.039	98,32%
	Total	1.736.279.337.000	1.590.920.682.420	91,63%

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2008 maka realisasi belanja BPK RI Tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp332.123.213.728 atau 26,38%, sebagaimana tergambar pada Tabel berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2008 dan 2009

No.	Uraian Belanja	TA 2009	TA 2008	Kenaikan (penurunan)	%
1	Belanja Pegawai	475.033.044.240	417.445.100.135	57.587.944.105	13,80
2	Belanja Barang	568.918.455.141	432.341.613.580	136.576.841.561	31,59
3	Belanja Modal	546.969.183.039	409.010.754.977	137.958.428.062	33,73
	Total	1.590.920.682.420	1.258.797.468.692	332.123.213.728	26,38

Rincian realisasi belanja berdasarkan sumber pendanaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Uraian belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi
1	Rupiah Murni	1.690.064.785.000	1.562.391.048.315	127.673.736.685	92,45%
2	Pinjaman	28.394.635.000	17.596.629.232	10.798.005.768	61,97%
3	Hibah	17.819.917.000	10.933.004.873	6.886.912.127	61,35%
	Total	1.736.279.337.000	1.590.920.682.420	145.358.654.580	91,63%

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Realisasi
Belanja
Pegawai
Rp475.033,04
juta*

B.2.2.1. Belanja Pegawai

Pagu anggaran untuk belanja pegawai tahun 2009 adalah Rp553.327.062.000, sedangkan realisasi belanja pegawai Tahun 2009 sebesar Rp475.033.044.240 atau 85,85% dari alokasi belanja pegawai yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 9
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	179.009.064.000	190.870.397.777	106,63%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	366.631.782.000	279.448.052.208	76,22%
Belanja Honorarium	4.284.600.000	1.983.800.000	46,30%
Belanja Lembur	2.862.791.000	2.366.724.175	82,67%
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	88.825.000	-	0,00%
Belanja Asuransi Kesehatan	450.000.000	364.070.080	80,90%
Total	553.327.062.000	475.033.044.240	85,85%

*Realisasi
Belanja Barang
Rp568.918,46
juta*

B.2.2.2. Belanja Barang

Pagu anggaran untuk belanja barang tahun 2009 adalah Rp626.637.487.000, sedangkan realisasi belanja barang Tahun 2009 sebesar Rp568.918.455.141 atau 90,79% dari alokasi belanja barang yang dianggarkan.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Barang Operasional	185.035.852.000	178.141.850.911	96,27%
Belanja Barang Non Operasional	127.191.427.000	110.017.575.308	86,50%
Belanja Jasa	49.820.602.000	42.104.140.648	84,51%
Belanja Pemeliharaan	36.107.126.000	31.087.757.882	86,10%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	217.969.310.000	200.713.502.824	92,08%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	10.513.170.000	6.853.627.568	65,19%
Jumlah	626.637.487.000	568.918.455.141	90,79%

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Realisasi
Belanja Modal
Rp546.969,18
Juta*

B.2.2.3. Belanja Modal

Pagu anggaran untuk belanja modal tahun 2009 adalah Rp556.314.788.000, sedangkan realisasi belanja modal Tahun 2009 sebesar Rp546.969.183.039 atau 98,32% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Belanja Modal Tanah	37.565.000.000	37.506.008.000	99,84%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.969.639.000	92.618.687.167	92,65%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	416.331.870.000	415.115.650.267	99,71%
Belanja Modal Fisik Lainnya	2.448.279.000	1.728.837.605	70,61%
Jumlah	556.314.788.000	546.969.183.039	98,32%

Belanja Modal Tanah sebesar Rp37.506.008.000 seluruhnya dikapitalisasi dalam perolehan aset tetap tanah (Catatan C.2.2.1)

Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp92.618.687.167 meliputi :

- Kapitalisasi pada aset tetap Peralatan dan Mesin	88.095.902.797
- Kapitalisasi pada Aset Tak Berwujud	3.491.735.750
- Pembelian tidak dikapitalisasi	782.149.868
- Pembelian barang ekstrakomptabel	142.964.152
- Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	104.140.600
- Kapitalisasi pada Persediaan	1.794.000
	<u>92.618.687.167</u>

Pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp415.115.650.267 meliputi :

- Kapitalisasi pada aset tetap KDP	234.130.441.642
- Kapitalisasi pada aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.115.775.992
- Kapitalisasi pada aset tetap Gedung dan Bangunan	43.093.539.842
- Kapitalisasi pada aset tetap Peralatan dan Mesin	34.302.509.453
- Kapitalisasi pada Uang Muka Belanja Modal	7.904.759.460
- Kapitalisasi pada aset tetap Tanah	5.342.349.205
- Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	4.895.483.998
- Pembelian barang ekstrakomptabel	51.021.982
- Pembelian tidak dikapitalisasi	66.291.600
- Lain-lain	213.477.093
	<u>415.115.650.267</u>

*Catatan Penting
Lainnya*

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.3.1. PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DI LUAR MEKANISME APBN

Pada tahun 2009, BPK RI masih menerima hibah di luar mekanisme APBN berupa *technical assistant* dari *Australian National Audit Office (ANAO)* dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas auditor BPK RI di bidang pemeriksaan keuangan dan kinerja.

Proposal kegiatan BPK RI yang di biyai hibah tersebut telah disetujui berdasarkan surat Penasehat GPF-AusAid No. GPF-2006-43 tanggal 12 Juni 2006 yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan BAPPENAS melalui surat No.3498/Dt 8.2/06/2006 tanggal 8 Juni 2006. Implementasi dari pemberian bantuan ini berupa penandatanganan ROU No. 38710 antara AusAid dan ANAO untuk membiayai ANAO dalam melakukan kegiatan tersebut di atas. Adapun tanggung jawab ANAO adalah mengawasi pelaksanaan dan melaporkan kegiatan serta bertanggung jawab dalam penyelesaian kegiatan tersebut.

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) tahun dari 1 Juli 2006 sampai dengan 30 Juni 2009 dengan nilai hibah \$AUS2,826,659. Hibah diperpanjang sampai dengan tahun 2010 sesuai persetujuan AusAid atas proposal yang diajukan ANAO kepada AusAid pada tanggal 1 Oktober 2009 dengan total nilai hibah menjadi \$AUS3,263,359.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saat ini BPK-RI sudah membuat surat Permohonan Nomor Register Hibah No. 12/S/X.4/1/2010 tanggal 28 Januari 2010 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Up. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Kementerian Keuangan, sebagai prasyarat untuk pengesahan atas hibah langsung tersebut.

B.3.2. PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS AKRUAL

Di samping menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas, BPK RI juga menyajikan Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan dan merupakan suplemen laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderal tersebut di atas.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

B.3.2. PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS AKRUAL (lanjutan)

Informasi Pendapatan dan Belanja AkruaI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Informasi Pendapatan dan Belanja AkruaI

No	Uraian	Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)	Penyesuaian AkruaI (Rp)		Informasi AkruaI (Rp)
			Tambah	Kurang	
1.	Pendapatan Sewa	382.882.189	65.000.000	397.000.000	50.882.189
2.	Belanja Pegawai	475.033.044.240	1.740.775.039	-	476.773.819.279
3.	Belanja Barang	568.918.455.141	1.241.542.052	2.532.870.756	567.627.126.437
4.	Belanja Modal	546.969.183.039	23.702.665.424	7.904.759.460	562.767.089.003

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca per 31 Desember 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Perbandingan Neraca TA 2009 dan 2008

Uraian	31 Desember 2009	31 Desember 2008	% Naik/ (Turun)
Aset	2.673.015.942.604	2.124.030.057.096	25,85
Kewajiban	9.803.599.597	13.872.161.566	(29,33)
Ekuitas Dana	2.663.212.343.007	2.110.157.895.530	26,21

Jumlah Aset per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.673.015.942.604 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp26.493.331.067, Aset Tetap sebesar Rp2.616.352.572.970, dan Aset Lainnya sebesar Rp170.038.567.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar Rp9.803.599.597 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas dana per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.663.212.343.007 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp16.689.731.470 dan ekuitas dana investasi sebesar Rp2.646.522.611.537.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. ASET LANCAR

Saldo Aset Lancar di Neraca BPK RI per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp26.493.331.067, turun sebesar Rp15.326.759.620 atau 36,65% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp41.820.090.687.

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp7.458.701.688, turun sebesar Rp5.005.300.755 atau 40,16% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp12.464.002.443.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.458.701.688 telah disetor ke rekening Kas Negara pada bulan Januari 2010.

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp7.458,70
Juta*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Kas lainnya
dan Setara Kas
Rp144,39 Juta*

C.2.1.2. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp144.388.643 sedangkan saldo per 31 Desember 2008 sebesar nihil.

Akun ini menampung kas selain uang muka dari KPPN yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Dari saldo sebesar Rp144.388.643 tersebut di atas, senilai Rp68.399.343 merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara yang dibukukan ke Pendapatan Yang Ditangguhkan (Catatan 2.4.1), sedangkan sisanya senilai Rp75.989.300 merupakan realisasi belanja yang belum dibayarkan ke pihak ke tiga (Catatan 2.4.4).

*Piutang Bukan
Pajak Rp2,31
Juta*

C.2.1.3. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp2.306.526, turun sebesar Rp858.914 atau 27,14% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp3.165.440.

Rincian saldo sebesar Rp2.306.526 per 31 Desember 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 14
Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2009

No.	Satuan Kerja	Jumlah	Keterangan
1.	BPK RI Perwakilan Prop. Nangroe Aceh Darussalam	Rp1.113.744	Persekot (uang muka gaji) pegawai yang masih harus dilunasi di tahun 2010.
2.	BPK RI Perwakilan Prop. Kalimantan Barat	Rp1.192.782	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri yang belum disetor ke kas Negara per 31 Desember 2009.
Total		Rp2.306.526	

*Bagian Lancar
TP/TGR
Rp26,16 Juta*

C.2.1.4. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2009 sebesar Rp26.162.037 turun sebesar Rp11.664.653 atau 30,84% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp37.826.690.

Saldo akun Bagian Lancar TP/TGR tersebut di atas berasal dari Piutang TGR pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal karena wanprestasi wajib kerja.

Uang Muka
Belanja
Rp10.437,63
Juta

C.2.1.5. Uang Muka Belanja

Saldo Uang Muka Belanja per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp10.437.630.216 turun sebesar Rp13.587.047.708 atau 56,55% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp24.024.677.924

Rincian saldo uang muka belanja per 31 Desember 2009 sebesar Rp10.437.630.216 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 15
Komposisi Uang Muka Belanja per 31 Desember 2009

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Uang Muka Belanja Barang	2.532.870.756
2.	Uang Muka Belanja Modal	7.904.759.460
Total		10.437.630.216

Uang Muka Belanja Barang merupakan pengeluaran satuan kerja BPK RI berupa sewa gedung/bangunan yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun per 31 Desember masih terdapat sewa dari pihak ketiga yang belum diterima/dinikmati oleh pengguna sewa. Adapun metode perhitungan Uang Muka Belanja Barang adalah nilai sewa dibagi dengan masa sewa dalam bulan dikalikan jumlah bulan yang masih belum digunakan.

Uang Muka Belanja Barang per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp2.532.870.756 naik sebesar Rp2.210.858.256 atau 686,58% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp322.012.500.

Uang Muka Belanja Modal berasal dari pemberian uang muka belanja untuk memulai pelaksanaan pekerjaan yang bersifat *multiyears* dan sampai dengan akhir tahun anggaran belum diperhitungkan sebagai pembayaran termin untuk penyelesaian pekerjaan.

Pada 31 Desember 2009 Uang Muka Belanja Modal adalah sebesar Rp7.904.759.460, turun sebesar Rp15.797.905.964 atau 66,65% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp23.702.665.424.

Penurunan nilai saldo uang muka belanja modal tersebut disebabkan adanya mutasi tambah sebesar Rp7.904.759.640 dan mutasi kurang sebesar Rp23.702.665.424.

C.2.1.5. Uang Muka Belanja (lanjutan)

Mutasi tambah sebesar Rp7.904.759.640 merupakan perhitungan atas uang muka yang telah dibayarkan untuk proyek pembangunan yang bersifat *multi years* 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Perhitungan Uang Muka Belanja Modal Per 31 Desember 2009

No.	Satuan Kerja	Pekerjaan	Uang Muka Pekerjaan	Pengakuan Uang Muka	UM Belanja Modal
1	BPK RI Perwakilan Prop. Papua Barat	Pembangunan Gedung Kantor	1.904.960.000	761.984.000	1.142.976.000
2	BPK RI Perwakilan Prop. Kepulauan Riau	Pembangunan Gedung Kantor	2.249.738.400	-	2.249.738.400
3	BPK RI Perwakilan Prop. Bangka Belitung	Pembangunan Gedung Kantor	2.378.619.900	951.447.960	1.427.171.940
4	BPK RI Perwakilan Prop. Kalimantan Tengah	Pembangunan Gedung Kantor	3.856.091.400	771.218.280	3.084.873.120
Jumlah					7.904.759.460

Rincian mutasi kurang sebesar Rp23.702.665.424 berasal dari uang muka belanja modal per 31 Desember 2008, yang seluruhnya sudah direklasifikasi ke dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2009, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 17
Rincian Uang Muka Belanja Modal Yang di Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Satuan Kerja	Pekerjaan	Uang Muka Belanja Modal (Rp)
1.	BPK RI Perwakilan Prop. Papua Barat	Pembangunan Gedung Kantor	2.521.320.000
2.	BPK RI Perwakilan Prop. NAD	Pembangunan Gedung Kantor	2.971.375.704
3.	BPK RI Perwakilan Prop. Jambi	Pembangunan Gedung Kantor	1.763.276.280
4.	BPK RI Perwakilan Prop. Maluku	Pembangunan Gedung Kantor	1.656.000.000
5.	BPK RI Perwakilan Prop. Jawa Timur	Pembangunan Gedung Kantor	3.870.600.000
6.	BPK RI Perwakilan Prop. DKI Jakarta	Pembangunan Gedung Kantor	7.142.000.000
7.	BPK RI Perwakilan Prop. Maluku Utara	Pembangunan Gedung Kantor	1.664.280.000
8.	BPK RI Perwakilan Prop. Sulawesi Tenggara	Pembangunan Gedung Kantor	2.113.813.440
Jumlah			23.702.665.424

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Persediaan**Rp8.424,14**Juta***C.2.1.6. Persediaan**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp8.424.141.957 naik sebesar Rp3.133.723.767 atau 59,23% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp5.290.418.190.

Adapun komposisi Persediaan berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18
Komposisi Persediaan Per 31 Desember 2009

No	Kode Akun	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	115111	Barang Konsumsi	6.817.563.741
2	115113	Bahan untuk pemeliharaan	516.879.895
3	115114	Suku Cadang	236.397.795
4	115121	Pita cukai, materai, leges	1.012.734
5	115126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	148.308.000
6	115131	Bahan Baku	48.812.760
7	115199	Persediaan Lainnya	655.167.032
TOTAL			8.424.141.957

Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan jumlah persediaan dalam kondisi baik.

C.2.2. ASET TETAP*Aset Tetap**Rp2.616.352,57**Juta*

Saldo Aset Tetap di BPK RI per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp2.616.352.572.970 naik sebesar Rp545.118.418.952 atau 26,32% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp2.071.234.154.018. Komposisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 19
Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2009 dan 2008

No	Uraian	31 Desember 2008	Perolehan	Reklasifikasi	Pelepasan	31 Desember 2009
1.	Tanah	1.065.049.071.536	48.562.417.205	3.607.983.412	(7.341.980.269)	1.109.877.491.884
2.	Peralatan dan Mesin	337.729.522.860	123.281.490.116	10.578.378.249	(8.315.357.051)	463.274.034.174
3.	Gedung dan Bangunan	525.141.043.261	46.498.857.744	275.561.158.873	(3.203.204.632)	843.997.855.246
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.552.190.797	86.552.734.527	-	(274.507.000)	93.830.418.324
5.	Aset Tetap Lainnya	27.759.651.231	5.738.758.598	(646.271.382)	(4.213.897.352)	28.638.241.095
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	108.002.674.333	257.833.107.066	(289.101.249.152)	-	76.734.532.247
		2.071.234.154.018	568.467.365.256	-	(23.348.946.304)	2.616.352.572.970

Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat tidak mengatur penyusutan aset tetap, sehingga penyusutan aset tetap belum dapat diperhitungkan dalam laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

C.2.2. ASET TETAP (lanjutan)

Lebih lanjut, PMK tersebut di atas dipertegas dengan surat dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-18/MK.6/2010 perihal Penyusutan Aset Tetap, yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan penyusutan aset tetap belum ditetapkan, sehingga penyusutan aset tetap di lingkungan Pemerintah Pusat belum diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.

Tanah
Rp1.109.877
Juta

C.2.2.1. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp1.109.877.491.884 naik sebesar Rp44.828.420.348 atau 4,21% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.065.049.071.536.

Kenaikan saldo tanah sebesar Rp44.828.420.348 terdiri dari:

- Perolehan	48.562.417.205
- Reklasifikasi	3.607.983.412
- Pelepasan	<u>(7.341.980.269)</u>
	<u>44.828.420.348</u>

Perolehan tanah di tahun 2009 sebesar Rp48.562.417.205 berasal dari:

- Kapitalisasi Belanja Modal Tanah	37.506.008.000
- Kapitalisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.342.349.205
- Hibah	5.714.060.000
	<u>48.562.417.205</u>

Reklasifikasi tanah di tahun 2009 sebesar Rp3.607.983.412 merupakan reklasifikasi dari pos aset tetap Gedung dan Bangunan (Catatan 2.2.3).

Pelepasan tanah di tahun 2009 sebesar Rp7.341.980.269 meliputi:

- Koreksi saldo awal	(6.762.715.000)
- Lain-lain	<u>(579.265.269)</u>
	<u>(7.341.980.269)</u>

Pada tahun 2009, BPK-RI memperoleh aset tetap berupa tanah dan bangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp6.267.114.000 dan telah tercatat dalam Laporan Keuangan BPK-RI. Selanjutnya dalam rangka pembangunan gedung baru, sebagian gedung yang dihibahkan senilai Rp2.455.544.000 diajukan ke Menteri Keuangan untuk dihapuskan dan telah mendapat persetujuan pada tanggal 11 Januari 2010. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah. Atas hibah ini, telah disampaikan surat ke Menteri Keuangan untuk diberikan nomor register agar pendapatan dan belanjanya dapat tercatat dalam APBN.

C.2.2.1. Tanah (lanjutan)

Terdapat selisih antara angka aset tanah dalam Neraca BPK RI Tahun 2009 dengan Laporan BMN BPK RI Tahun 2009 sebesar Rp3.437.454.280 yang terjadi karena Neraca mencatat pengembangan aset tanah yang tercatat pada 4 (empat) Satuan Kerja BPK RI Perwakilan yang pembiayaannya dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal, namun transaksi tersebut tidak masuk dalam Laporan BMN karena tidak dapat dicatat dalam SIMAK-BMN. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja		Nilai
1.	BPK RI Pwk. Prop. Papua	Rp	47.404.280
2.	BPK RI Pwk. Prop. Sulawesi Utara	Rp	984.400.000
3.	BPK RI Pwk. Prop. Lampung	Rp	23.650.000
4.	BPK RI Pwk. Prop. Jawa Barat	Rp	2.382.000.000
	TOTAL	Rp	<u>3.437.454.280</u>

*Peralatan dan mesin
Rp463.274Juta*

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp463.274.034.174 naik sebesar Rp125.544.511.314 atau 37,17% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp337.729.522.860.

Kenaikan saldo Peralatan dan Mesin sebesar Rp125.544.511.314 terdiri dari:

- Perolehan	123.281.490.116
- Reklasifikasi	10.578.378.249
- Pelepasan	<u>(8.315.357.051)</u>
	<u>125.544.511.314</u>

Perolehan Peralatan dan Mesin di tahun 2009 sebesar Rp123.281.490.116 berasal dari:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.095.902.797
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.302.509.453
- Belanja Barang	<u>883.077.866</u>
	<u>123.281.490.116</u>

Reklasifikasi peralatan dan mesin di tahun 2009 sebesar Rp10.578.378.249 merupakan reklasifikasi dari pos aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.932.106.867 (Catatan 2.2.3) dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp646.271.382 (Catatan 2.2.5)

Pelepasan peralatan dan mesin di tahun 2009 sebesar Rp8.315.357.051 meliputi:

- Penghentian aset dari penggunaan	(6.516.935.422)
- Penghapusan	(110.250.000)
- Reklas ke aset tidak berwujud	(1.440.000.000)
- Lain - lain	<u>(248.171.629)</u>
	<u>(8.315.357.051)</u>

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin (lanjutan)

Sehubungan terjadinya gempa Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009, terdapat peralatan dan mesin pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam kondisi rusak berat sehingga harus direklas ke Aset lainnya sebesar Rp192.250.943.

*Gedung dan
Bangunan
Rp843.997,86
Juta*

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp843.997.855.246 naik sebesar Rp318.856.811.985 atau 60,72% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp525.141.043.261.

Kenaikan saldo Gedung dan Bangunan sebesar Rp318.856.811.985 terdiri dari:

- Perolehan	46.498.857.744
- Reklasifikasi	275.561.158.873
- Pelepasan	(3.203.204.632)
	<u>318.856.811.985</u>

Perolehan Gedung dan Bangunan di tahun 2009 sebesar Rp46.498.857.744 berasal dari:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.093.539.842
- Belanja Barang	333.080.966
- Hibah	2.598.689.000
- Lain-lain	473.547.936
	<u>46.498.857.744</u>

Reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp275.561.158.873 terdiri dari:

- Reklasifikasi dari KDP	289.101.249.152
- Reklasifikasi ke aset tetap Tanah	(3.607.983.412)
- Reklasifikasi ke aset tetap Mesin dan Peralatan	(9.932.106.867)
	<u>275.561.158.873</u>

Pelepasan Gedung dan Bangunan di tahun 2009 sebesar Rp3.021.969.132 meliputi:

- Penghentian aset dari penggunaan	(3.021.969.132)
- Penghapusan	(181.235.500)
	<u>(3.203.204.632)</u>

Gedung Pusdiklat yang berlokasi di Jl. Binawarga II, Kalibata Raya, Jakarta Selatan berdiri di atas tanah milik Kementerian Keuangan dengan Sertifikat Hak Pakai No.169 Tahun 1987, yang sampai dengan saat ini belum ada serah terima dari Kementerian Keuangan.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan (lanjutan)

BPK RI mengelola barang yang mempunyai nilai sejarah yang berlokasi di Gedung Museum BPK RI, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta. Di masa yang akan datang, barang bersejarah tersebut akan diserahkan pengelolaannya beserta pencatatannya ke Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah karena secara geografis Gedung Museum BPK RI tersebut terletak di Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat selisih antara angka dalam Neraca Sekretariat Jenderal 2009 dengan Laporan BMN 2009 sebesar Rp14.568.506.780 yang terjadi karena Neraca Sekretariat Jenderal mencatat pengembangan aset Gedung dan Bangunan yang tercatat di Satuan Kerja Pusdiklat/BPK RI Perwakilan yang pembiayaannya dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal, namun transaksi tersebut tidak masuk dalam Laporan BMN karena tidak dapat dicatat dalam SIMAK-BMN. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Gedung dan Bangunan tahun 2008 yang tidak dicatat dalam SIMAK-BMN	
a. BPK Pusat	Rp 91.474.000
Jumlah	<u>Rp 91.474.000</u>
2. Pengembangan Gedung dan Bangunan tahun 2009 yang tidak dicatat dalam SIMAK-BMN	
a. BPK RI Perwakilan Prop. Irian Jaya	Rp 14.300.000
b. BPK RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat	Rp 49.190.000
c. BPK RI Perwakilan Prop. Sumatera Utara	Rp 5.313.138.500
d. BPK RI Perwakilan Prop. Sulawesi Selatan	Rp 6.451.019.280
e. BPK RI Perwakilan Prop. DKI Jakarta	Rp 537.077.000
f. BPK RI Perwakilan Prop. Jawa Barat	Rp 42.462.000
g. Pusdiklat BPK RI	<u>Rp 2.069.846.000</u>
Jumlah	<u>Rp 14.477.032.780</u>
TOTAL	<u><u>Rp 14.568.506.780</u></u>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp93.830,42
Juta*

C.2.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp93.830.418.324 naik sebesar Rp86.278.227.527 atau 1142,43% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.552.190.797.

Kenaikan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp86.278.227.527 terdiri dari:

- Perolehan	86.552.734.527
- Pelepasan	(274.507.000)
	<u>86.278.227.527</u>

Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan di tahun 2009 sebesar Rp86.552.734.527 berasal dari:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.115.775.992
- Belanja Barang	451.173.500
- Hibah	274.507.000
- Lain-lain	711.278.035
	<u>86.552.734.527</u>

Pelepasan Jalan, Irigasi, dan Jaringan di tahun 2009 sebesar Rp274.507.000 merupakan penghentian aset dari penggunaannya.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp28.638,24
Juta*

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2009 adalah senilai Rp28.638.241.095 naik sebesar Rp878.589.864 atau naik 3,16% dari saldo per 31 Desember 2008 senilai Rp27.759.651.231.

Kenaikan saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp878.589.864 terdiri dari:

- Perolehan	5.738.758.598
- Reklasifikasi	(646.271.382)
- Pelepasan	(4.213.897.352)
	<u>878.589.864</u>

Perolehan Aset Tetap Lainnya di tahun 2009 sebesar Rp5.738.758.598 berasal dari:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.895.483.998
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.140.600
- Belanja Barang	739.134.000
	<u>5.738.758.598</u>

Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp646.271.382 merupakan reklasifikasi ke pos aset tetap Peralatan dan Mesin.

Pelepasan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.213.897.352 merupakan reklasifikasi ke pos aset tetap Peralatan dan Mesin meliputi penghapusan dan penyerahan aset yang direnovasi kepada pemilik aset.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp76.734,53
Juta

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp76.734.532.247 turun sebesar Rp31.268.142.086 atau 28,95% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp108.002.674.333.

Penurunan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp31.268.142.086 terdiri dari:

- Perolehan	257.833.107.066
- Reklasifikasi	<u>(289.101.249.152)</u>
	<u>(31.268.142.086)</u>

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Lokasi	Pekerjaan	Nilai KDP
DIPA Setjen			
1	Riau	Rumah Jabatan	2.041.046.500
2	Sumatera Barat	Rumah Jabatan	752.694.511
3	Sumatera Barat	Gedung Kantor	3.580.174.000
4	Bengkulu	Gedung Kantor	725.670.000
5	Lampung	Gedung Kantor	734.400.000
6	Banten	Gedung Kantor	431.789.000
7	Jawa Barat	Gedung Kantor	990.230.000
8	Kantor Pusat	Gedung Parkir /Olah raga	22.536.672.500
9	Nusa Tenggara Barat	Gedung Kantor	774.972.000
10	Gorontalo	Gedung Kantor	710.820.000
11	Bangka Belitung	Gedung Kantor	3.262.102.060
12	Sumatera Utara	Gedung Diklat	5.979.899.000
13	Kalimantan Timur	Gedung Kantor	20.644.500.500
14	Kalimantan Tengah	Gedung Kantor	915.126.880
DIPA Satker			
15	Pusdiklat	Gedung Diklat	3.090.550.556
16	NAD	Gedung Kantor	34.562.000
17	Riau	Rumah Jabatan	1.247.181.750
18	Sumatera Barat	Gedung Kantor	5.755.816.990
19	Kalimantan Timur	Gedung Kantor	2.486.824.000
20	Kalimantan Selatan	Rumah Jabatan	39.500.000
Jumlah			76.734.532.247

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (lanjutan)

Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di tahun 2009 sebesar Rp257.833.107.066 berasal dari:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.130.441.642
- Reklasifikasi dari Uang Muka Belanja Modal	23.702.665.424
	<u>257.833.107.066</u>

Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp289.101.249.152 merupakan reklasifikasi ke pos aset tetap Gedung dan Bangunan.

Aset Lainnya
Rp30.170,04
Juta

C.2.3. ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp30.170.038.567 naik sebesar Rp19.194.226.176 atau 174,88% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp10.975.812.391.

TP/TGR
Rp18,87 Juta

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp18.870.000, sedangkan saldo per 31 Desember 2008 nihil.

Selama tahun 2009 terdapat mutasi tambah dan kurang TGR yang terdiri dari:

- Mutasi tambah Tagihan TGR tahun 2009 sebesar Rp56.696.690 berasal dari Reklas dari Bagian Lancar Tagihan TGR ke Tagihan TGR sebesar Rp37.826.690, dan penambahan tagihan TGR sebesar Rp18.870.000.
- Mutasi kurang Tagihan TGR tahun 2009 sebesar Rp37.826.690.

Aset Tak Berwujud
Rp.14.220,94
Juta

C.2.3.2. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp14.220.947.090 naik sebesar Rp 6.652.158.750 atau 87,89% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp7.568.788.340. Kenaikan tersebut terjadi karena terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.897.956.250 dan mutasi kurang sebesar Rp245.797.500.

Aset Lain-lain
R15.930,22
Juta

C.2.3.3. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp15.930.221.477 naik sebesar Rp12.523.197.426 atau 367,57% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp3.407.024.051.

Aset lain-lain ini terdiri dari:

- Saldo akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2009 sebesar Rp14.088.198.251.
- Saldo Tagihan Piutang TGR yang Dilimpahkan ke DJKN (Aset Lain-Lain) per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.842.023.226.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp9.803,60 juta*

C.2.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp9.803.599.597 turun sebesar Rp4.068.561.969 atau 29,52% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp13.872.161.566.

*Utang kepada
pihak ketiga
Rp1.879,50
Juta*

C.2.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp1.879.498.566 turun sebesar Rp471.339.443 atau 33,47% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.408.159.123.

Dari saldo sebesar Rp1.879.498.566 tersebut di atas, senilai Rp75.989.300 merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga lainnya yang dananya tersedia di Bendahara Pengeluaran dan disajikan sebagai Kas Lainnya (Catatan C.2.1.2)

*Pendapatan
sewa diterima
di muka
Rp397,00 Juta*

C.2.4.2. Pendapatan Sewa Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Sewa Diterima di Muka per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp397.000.000, sedangkan saldo 31 Desember 2008 nihil. Rincian saldo Pendapatan Diterima di Muka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21
Rincian Pendapatan Sewa Diterima di Muka

No.	Pendapatan		Jumlah (Rp)
	Kode Akun	Uraian	
1.	423142	Pendapatan sewa gedung bangunan dan gudang (PT Telkomsel)	20.000.000
2.	423142	Pendapatan sewa gedung bangunan dan gudang (PT Indosat Tbk)	52.500.000
3.	423142	Pendapatan sewa gedung bangunan dan gudang (PT Tara Telco Indonesia)	324.500.000
Jumlah			397.000.000

Akun pendapatan sewa diterima di muka timbul pada saat BPK RI telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga dan pembayaran sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Pada posisi 31 Desember 2009 masih terdapat barang/jasa/fasilitas dari BPK RI yang belum dinikmati pihak ketiga.

*Uang muka dari
KPPN
Rp7.458,70
Juta*

C.2.4.3. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka Dari KPPN per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp7.458.701.688 turun sebesar Rp5.005.300.755 atau 40,16% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp12.464.002.443.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

Pendapatan yang ditangguhkan Rp68,40 Juta

C.2.4.4. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2009 adalah Rp68.399.343, sedangkan saldo per 31 Desember 2008 nihil.

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara yang dananya tersedia di Bendahara Pengeluaran dan disajikan sebagai Kas Lainnya (Catatan C.2.1.2).

Ekuitas Dana Lancar Rp16.689,73 Juta

C.2.5. EKUITAS DANA LANCAR

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp16.689.731.470 turun sebesar Rp11.258.197.651 atau 40,28% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp27.947.929.121.

Cadangan Piutang Rp10.466,10 Juta

C.2.5.1. Cadangan Piutang

Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp10.466.098.779 turun sebesar Rp13.599.571.275 atau 56,51% dari saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2008 sebesar Rp24.065.670.054.

Akun Cadangan Piutang merupakan penyeimbang akun Piutang PNBPN, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Uang Muka Belanja Modal dan Belanja Barang Dibayar Di Muka.

Cadangan Persediaan Rp8.424,14 Juta

C.2.5.2. Cadangan Persediaan

Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp8.424.141.957 naik sebesar Rp3.133.723.767 atau 59,23% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp5.290.418.190.

Akun Cadangan Persediaan merupakan penyeimbang akun Persediaan.

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek (Rp2.200,51 Juta)

C.2.5.3. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Saldo Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp2.200.509.266 naik sebesar Rp792.350.143 atau 56,27% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.408.159.123.

Akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan penyeimbang kelompok akun Utang Kepada Pihak Ketiga ditambah dengan pendapatan diterima di muka setelah dikurangi kas lainnya yang tersedia untuk pembayaran utang pihak ketiga lainnya sebesar Rp75.989.300 (Catatan 2.4.1).

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh)

*Ekuitas Dana
investasi
Rp2.646.522,61
juta*

C.2.6. EKUITAS DANA INVESTASI

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp2.646.522.611.537 naik sebesar Rp564.312.645.128 atau 27,10% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp2.082.209.966.409.

*Diinvestasikan
dalam Aset
Tetap
Rp2.616.352,57
Juta*

C.2.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp2.616.352.572.970 naik sebesar Rp545.118.418.952 atau 26,32% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp2.071.234.154.018.

Akun Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan penyeimbang kelompok akun Aset Tetap.

*Diinvestasikan
dalam Aset
Lainnya
Rp30.170,04
Juta*

C.2.6.1. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp30.170.038.56 naik sebesar Rp19.194.226.176 atau 174,88% dari saldo per 31 Desember 2008 sebesar Rp10.975.812.391.

Akun Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan penyeimbang kelompok akun Aset Lainnya.